

## SKRIPSI

### EKSISTENSI LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL (LMKN) DALAM PERLINDUNGAN TERHADAP HAK CIPTA ATAS KARYA LAGU

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Andalas*

Oleh:



Ulfanora, S.H., M.H  
Shafira Hijriya, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2026

No.Reg : 20/PK-I/I/2026

# EKSISTENSI LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL (LMKN)

## DALAM PERLINDUNGAN TERHADAP HAK CIPTA ATAS KARYA LAGU

*(Efyolla Tavira, 2110113017, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2025)*

### ABSTRAK

Lagu sebagai salah satu bentuk karya cipta di bidang musik memiliki nilai ekonomi dan nilai moral yang perlu dilindungi oleh hukum. Perlindungan terhadap hak cipta atas karya lagu merupakan bagian dari upaya menjamin kepastian hukum dan penghormatan atas hak-hak pencipta. Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan tujuan untuk menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan royalti dari pemanfaatan karya musik secara kolektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi LMKN dalam perlindungan hukum terhadap hak cipta atas karya lagu, serta mengevaluasi efektivitas peranannya dalam menegakkan hak ekonomi para pencipta. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus terhadap dua rumusan masalah, yaitu: (1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak cipta atas karya lagu? (2) Bagaimana eksistensi lembaga manajemen kolektif nasional (LMKN) dalam perlindungan terhadap hak cipta atas karya lagu? Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LMKN memiliki peran yang strategis sebagai perpanjangan tangan negara dalam pengelolaan hak cipta, khususnya dalam menarik, menghitung, dan mendistribusikan royalti secara adil kepada pencipta. Namun, dalam implementasinya, LMKN masih menghadapi tantangan seperti rendahnya kesadaran pengguna, tumpang tindih kewenangan dengan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), serta keterbatasan dalam pengawasan dan penegakan hukum. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa keberadaan LMKN merupakan wujud perlindungan hukum negara terhadap hak cipta lagu, namun diperlukan penguatan regulasi turunan, sosialisasi yang masif, serta sinergi antarlembaga untuk meningkatkan efektivitas perlindungan tersebut. Rekomendasi yang diberikan antara lain adalah peninjauan ulang peraturan pelaksana serta peningkatan transparansi dalam mekanisme distribusi royalti oleh LMKN.

**Kata Kunci: Hak Cipta, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, Perlindungan Hukum, Karya Lagu**